



LOGIKA DILEMA KEAMANAN ASIA TIMUR DAN RASIONALITAS PENGEMBANGAN SENJATA NUKLIR KOREA UTARA

M. Najeri Al Syahrin

Program Studi Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur;
email: najeri.alsyahrin@umkt.ac.id

Abstract

This article examined how the rationality of nuclear weapons development of North Korea related to the security dilemma. The discussion includes descriptions of chain reactions from the cycle of security dilemmas that create the dynamics of an arms race that threatens the stability of the region's security. The security dilemma for North Korea is characterized by the polarity of forces, historical factors and social construction of amity and enmity. Through the literature study method, the theoretical concepts of security dilemmas serve as the main basis in understanding North Korea's nuclear weapons development. Therefore, this article concluded that the security dilemma in East Asia stems from the fear and threat due to the increasing power and military capability of other countries in the region.

Kata Kunci: North Korea, polarity of power, security dilemma

Abstrak

Artikel ini mengkaji tentang rasionalitas pengembangan senjata nuklir oleh Korea Utara dikaitkan dengan dilema keamanan di Asia Timur. Pembahasan meliputi deskripsi tentang reaksi berantai dari siklus dilema keamanan yang menciptakan dinamika perlombaan senjata yang mengancam stabilitas keamanan kawasan. Dilema keamanan bagi Korea Utara ditandai dengan polaritas kekuatan, faktor historis dan konstruksi sosial *amity* dan *enmity*. Melalui metode studi literatur, konsep teoritis dilema keamanan dijadikan landasan utama dalam memahami pengembangan senjata nuklir Korea Utara. Artikel ini menyimpulkan bahwa dilema keamanan di kawasan Asia Timur bersumber pada rasa takut dan ancaman akibat peningkatan kekuatan dan kapabilitas militer negara-negara lain di kawasan.

Keywords: dilema keamanan, Korea Utara, polaritas power

Pendahuluan

Tulisan ini dimulai dengan pandangan bahwa seringkali terdapat ketidakpastian (*uncertainty*) dalam hubungan keamanan antara Korea Utara dan Amerika Serikat. Beberapa waktu belakangan, terdapat peningkatan tensi keamanan yang telah menciptakan kondisi kritis serta menunjukkan kemungkinan terjadinya perang di Asia Timur akibat dari pengembangan senjata nuklir Korea Utara. Di sisi lain, Korea Utara dalam kesempatan yang berbeda meyakinkan bahwa Korea Utara mengembangkan nuklir hanya untuk menginginkan jaminan keamanan dari adanya kemungkinan serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan negara aliansinya di Asia Timur, yaitu Jepang dan Korea Selatan. Pemerintahan Trump, seperti pemerintahan Amerika Serikat sebelumnya, juga selalu menyatakan bahwa mereka tidak memiliki kepentingan untuk melakukan perubahan kepemimpinan dinasti Kim dan hanya ingin agar Amerika Serikat dan negara aliansinya di Asia Timur tidak merasa terancam oleh kekuatan senjata nuklir yang dikembangkan oleh Korea Utara. Pada prinsipnya, hal ini terlihat seperti kondisi keamanan yang kompatibel. Artinya, antarnegara baik Amerika Serikat dan negara aliansinya (Jepang dan Korea Selatan) tidak pernah secara langsung akan mengancam keamanan Korea Utara, mereka hanya menginginkan agar Korea Utara berhenti untuk mengembangkan program senjata nuklir yang dinilai sangat mengancam stabilitas keamanan kawasan (Fearon, 2017). Korea Utara juga tidak pernah secara langsung menyatakan bahwa Korea Utara menjadikan kebijakan pengembangan nuklir sebagai kebijakan keamanan yang ofensif dan ekspansionis.

Eskalasi ketegangan keamanan di Semenanjung Korea kian berkembang menjadi lebih kompleks dan dilematis daripada sebelumnya. Penulis berpandangan semakin kuat pertahanan dan sistem persenjataan negara-negara Asia Timur, maka Korea Utara merasa semakin terancam sehingga berupaya mengembangkan kebijakan nuklir untuk meningkatkan pertahanan dan keamanan serta mengimbangi keunggulan militer negara-negara lain di Asia Timur.

Logika Dilema Keamanan di Kawasan Asia Timur

Pasca Perang Dingin, diskursus tentang dilema keamanan berfokus pada dinamika kekuatan dan interaksi antara dua negara dengan kekuatan militer yang setara, seperti Amerika Serikat dan Uni Soviet. Ketakutan akan perang nuklir antara kedua negara, pada

awal 1980-an, adalah kondisi yang dikenal dengan istilah '*Hobbesian Fear*', yaitu kondisi ketika negara adikuasa hanya bersikap defensif terhadap provokasi negara lain tetapi tindakan tersebut justru menimbulkan kekhawatiran bagi negara lain. Amerika Serikat dan Uni Soviet terperangkap dalam cengkeraman siklus permusuhan. Rasa takut dan ketidakpercayaan terhadap pihak lain dikarenakan terdapat perbedaan interpretasi motif dan ancaman. Masing-masing negara membenarkan kebijakan militer berdasarkan persepsi ancaman dari kekuatan militer negara lain (Booth & Wheeler, 2008).

Selain kekhawatiran dan rasa takut akan ancaman serangan dari negara lain dan kompleksitas keamanan kawasan yang ditandai dengan rivalitas politik dan ekonomi antara Amerika Serikat dan Cina, dilema keamanan di Semenanjung Korea juga disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, polaritas kekuatan kawasan dan kedua konstruksi sosial *amity* dan *enmity*. Kedua faktor ini merupakan bagian dari aspek pembentuk kompleksitas keamanan kawasan menurut Barry Buzan dan Ole Waever. Dalam *Regional Security Complex Theory* (RSCT) Buzan dan Waever mengidentifikasi empat aspek penyebab terbentuknya kompleksitas keamanan kawasan, yaitu kedekatan geografis, anarkisme kawasan, polaritas kekuatan dan konstruksi sosial *amity* dan *enmity* (Buzan & Wæver, 2003). Pada tulisan ini, hanya dua aspek terakhir saja yang digunakan sebagai landasan analisis karena kedua faktor tersebut merupakan faktor yang paling berpengaruh dalam terbentuknya kompleksitas dan dilema keamanan di kawasan Asia Timur. Bagian selanjutnya dari artikel ini akan membahas tentang implikasi polaritas kekuatan serta konstruksi sosial *amity* dan *enmity* sebagai aspek yang menentukan dalam rasionalitas pengembangan senjata nuklir Korea Utara.

Sebaliknya, kini pola interaksi keamanan antara Amerika Serikat dan Korea Utara dapat digambarkan sebagai kondisi dilema keamanan yang bersifat asimetris, yaitu dinamika kekuatan dan interaksi antara negara yang lemah dengan ambisi nuklir (Korea Utara) dan negara dengan kekuatan militer paling kuat saat ini (Amerika Serikat). Dengan kekuatan konvensional sistem persenjataannya, Amerika Serikat idealnya tidak memiliki masalah yang berarti dalam 'memaksa' Korea Utara untuk menghentikan pengembangan senjata nuklir. Namun, Korea Utara secara jeli telah menunjukkan kemampuan dalam memanfaatkan peluang, baik secara politik maupun keamanan, dalam berinteraksi dengan Amerika Serikat yang memungkinkannya untuk memiliki senjata nuklir (East West Center, 2016).

Pemerintahan Trump menyatakan bahwa mereka akan mengeluarkan kebijakan yang berbeda daripada kebijakan sebelumnya. Pemerintahan Trump melalui deklarasi Wakil Presiden, Mike Pence pada awal tahun 2017 menyatakan bahwa kebijakan keamanan Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Obama, ‘*Strategic Patience*’ telah berakhir. Tetapi Amerika Serikat kini juga berada dalam kondisi dilematis. Intervensi militer terhadap Korea Utara pasti akan menyebabkan kerugian luar biasa tidak hanya bagi kedua negara tetapi juga negara lain di kawasan, bahkan serangan militer bisa memicu terjadinya perang nuklir global (Grice, 2017). Donald Trump merencanakan pertemuan dengan Kim Jong-un untuk melakukan pembahasan nuklir yang direncanakan akan dilaksanakan pada Mei 2018. Pertemuan tersebut diharapkan mampu menghasilkan komitmen untuk melakukan denuklirisasi dan menanggukhan uji coba nuklir dan rudal Korea Utara. Singh (2018) memandang pertemuan tersebut mampu memberikan perkembangan positif bagi non-proliferasi nuklir di kawasan Asia Timur, di tengah kondisi Amerika Serikat dan Korea Utara yang saling bersitegang. Hasil pembicaraan Amerika Serikat dengan Korea Utara tidak hanya akan berdampak pada keamanan negara sekutu tetapi juga bagi Cina (Singh, 2018).

Menjelang akhir Maret 2018, Kim Jong-un melakukan kunjungan ke Beijing, Cina. Kunjungan itu memungkinkan bagi Kim Jong-un untuk mendapatkan jaminan dari Cina bahwa Pemerintah Cina akan mendukung Korea Utara jika pertemuan Kim dan Trump gagal mencapai kesepakatan. Kunjungan tersebut merupakan peringatan bagi Trump bahwa Cina memiliki posisi vital dan peranan penting sebagai pemain sentral dalam krisis nuklir Semenanjung Korea (Johnson & Kikuchi, 2018). Korea Utara telah lama bersikap provokatif dengan retorika yang selalu mengancam stabilitas keamanan, upaya pembunuhan serta penjualan teknologi nuklir dan rudal. Selama ini, Korea Utara kerap bersikap kooperatif ketika menghadapi ancaman keamanan serangan langsung. Sebaliknya, Korea Utara cenderung bersifat konfrontatif ketika ancaman telah berkurang (Morgan, 2006).

Terdapat persepsi bahwa bagi negara-negara di kawasan Asia Timur, runtuhnya Korea Utara tampaknya sama berbahaya dan mengancam, daripada penggunaan senjata nuklirnya. Bagi Cina, jumlah pengungsi akibat dari runtuhnya Korea Utara akan merepotkan bagi Cina, kondisi teritorial yang berbatasan dengan Korea Utara secara langsung pasti akan membuat Cina sangat berhati-hati dalam upaya mendukung

reunifikasi dua Korea. Dilihat dari sisi kepentingan keamanan, runtuhnya Korea Utara juga bisa menjadikan kepentingan strategis Amerika Serikat untuk ‘mengawasi’ Cina di kawasan Asia Timur menjadi lebih mudah (Yea, 2017).

Sejak Kim Jong-un dilantik sebagai pemimpin Korea Utara pada tahun 2011, Amerika Serikat, Korea Selatan, Cina dan Jepang berharap bahwa Kim dapat memberikan perspektif baru dalam kebijakan luar negeri Korea Utara khususnya dalam kebijakan keamanan. Namun, jika membandingkan dengan masa pemerintahan Kim Jong-il yang berkuasa selama delapan belas tahun sebelumnya, saat itu hanya terdapat sekitar delapan belas tes rudal kendali. Kini, selama empat tahun pemerintahan Kim Jong-un, sampai dengan bulan Juli 2016, sudah terdapat dua puluh lima uji coba rudal kendali. Korea Utara juga telah berhasil melakukan uji coba nuklir bawah tanah dan hasil uji coba tersebut menunjukkan perangkat nuklir Korea Utara memiliki kekuatan eksplosif yang lebih besar. Pada Februari 2016, Korea Utara mengklaim telah berhasil meluncurkan satelit *Kwangmyongsong 4*, sebuah model satelit yang lebih maju daripada yang diluncurkan pada Desember 2012 (Chung, 2016).

Kegiatan dan ujicoba tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa "*First Military Policy*" sebagai doktrin utama politik luar negeri Korea Utara tetap tidak berubah. Meskipun Kim Jong-un baru berusia 27 tahun ketika dia pertama kali berkuasa dan hanya memiliki sedikit waktu untuk mempersiapkan pemerintahannya, kemampuan Kim Jong-un dalam melakukan modernisasi sistem persenjataan Korea Utara sangat efektif. Setelah uji coba nuklir yang dilakukan pada Oktober 2006 dan Mei 2009 di masa pemerintahan Kim Il-sung, Kim Jong-un hanya dalam kurun waktu 3 tahun, yaitu sejak Februari 2013 dan Januari 2016 telah melakukan dua kali uji coba nuklir. Intensitas pengujian nuklir yang dilaksanakan pada tahun 2013 dan 2016 menunjukkan bahwa senjata nuklir merupakan identitas kelangsungan rezim Korea Utara (Chung, 2016).

Ketegangan terus terjadi akibat pengembangan senjata nuklir Korea Utara di kawasan Asia Timur. Pada 3 September 2017, Korea Utara kembali melakukan uji coba nuklir yang kelima dan pada 15 September 2017, Korea Utara menembakkan rudal balistik jarak menengah ke perairan Jepang di kawasan Pasifik. Rudal ini dilaporkan bisa mencapai jarak 3.700 kilometer yang membuat wilayah pangkalan militer Amerika Serikat di Guam berada dalam jangkauan senjata Korea Utara. Atas konsekuensi serangan tersebut, pada 27 November 2017, Amerika Serikat kembali memasukkan Korea Utara

dalam daftar negara sponsor terorisme setelah dicabut dari daftar tersebut pada Oktober 2008 (Muhaimin, 2018).

Ancaman senjata nuklir Korea Utara di Semenanjung Korea juga dirasakan oleh Korea Selatan. Terlebih, ketika Korea Utara menembakkan beberapa artileri ke wilayah Korea Selatan pada 20 Agustus 2015 (McKirdy & Novak, 2015). Merespon tindakan provokatif Korea Utara tersebut, Korea Selatan kemudian juga menembakkan artileri, yang dibalas dengan pernyataan siap perang dari pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un (The Guardian, 2015).

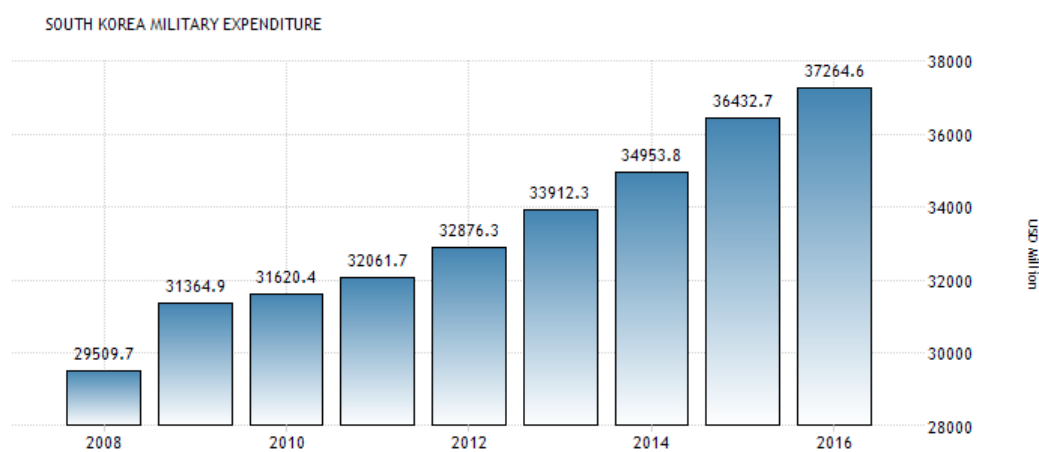
Polaritas Kekuatan Kawasan: Rasionalitas Pengembangan Senjata Nuklir Korea Utara

Faktor pertama yang menciptakan kondisi dilema keamanan bagi Korea Utara adalah polaritas kekuatan antarnegara di kawasan. Ketika suatu negara tidak bisa mengikuti dinamika keseimbangan atas polaritas kekuatan tersebut, maka negara tersebut rentan menjadi sasaran dominasi dan ekspansi negara lain. Polaritas kekuatan yang tidak seimbang ini menunjukkan terdapatnya distribusi kekuatan yang tidak merata di antara negara-negara di kawasan dan negara aliansi. Pertumbuhan dan akselerasi sistem persenjataan negara-negara kawasan Asia Timur terus meningkat. Berakhirnya Perang Dingin ternyata tidak secara langsung menurunkan kecenderungan tensi peningkatan anggaran militer di kawasan Asia Timur. Hampir semua negara di kawasan Asia Timur tetap meningkatkan pembangunan kekuatan militer tanpa terpengaruh peristiwa penting tersebut. Kemajuan ekonomi dan respon terhadap konflik di kawasan merupakan faktor yang menyebabkan negara-negara di kawasan Asia Timur tetap meningkatkan anggaran militer masing-masing.

Apabila dicermati sejak masa Perang Dingin, di kawasan Asia Timur pembangunan militer melalui peningkatan anggaran belanja militer terus meningkat. Pengeluaran pertahanan Korea Selatan diperkirakan akan terus meningkat sebesar 214,7 miliar dolar antara tahun 2016 sampai tahun 2020 atau sekitar 7% per tahun. Anggaran tersebut akan diproyeksikan untuk biaya pemeliharaan dan peningkatan kemampuan militer (Panda, 2015). Tahun 2008 anggaran belanja militer Korea Selatan berjumlah sekitar 29,5 miliar dolar, tahun 2014 meningkat menjadi 34,9 miliar dolar dan tahun 2016 sejumlah 37,2 miliar dolar (Trading Economics, 2018).

Ministry of National Defense (MND) Korea Selatan mengumumkan pada 29 Agustus 2017 bahwa anggaran pertahanan Korea Selatan pada tahun 2018 akan meningkat 6,9% menjadi 38,2 miliar dolar. Peningkatan tersebut merupakan kenaikan tahunan terbesar dalam anggaran pertahanan Korea Selatan sejak tahun 2009 (Grevatt, 2017). Korea Selatan juga terus melakukan peningkatan kekuatan militernya dengan didukung oleh kemajuan ekonomi dan bantuan militer dari Amerika Serikat. Modernisasi militer Korea Selatan dilakukan dengan peningkatan anggaran militer disertai dengan peningkatan kekuatan teknologi persenjataan yang semakin berkembang (Feffer, 2009). Gambar 1 berikut adalah grafik kenaikan anggaran militer Korea Selatan.

Gambar 1 – Pengeluaran Belanja Militer Korea Selatan Tahun 2008-2016



Sumber: Trading Economics dan SIPRI, 2018

Cina juga secara cepat melakukan modernisasi militer, misalnya dalam pengembangan satelit luar angkasa, rudal balistik, dan pembangunan kapal selam, yang tentu menyebabkan kekhawatiran bagi negara lain di Asia Timur (Jeong, 2012). Sejak tahun 2005 sampai 2018, Cina secara konsisten terus meningkatkan anggarannya. Pada tahun 2010, peningkatan anggaran militer mencapai 7,5%, 12,7% pada tahun 2011, 11,2% pada tahun 2012, dan 10,7% pada tahun 2013. Untuk tahun 2015, Cina meningkatkan anggaran militer sebesar 10,1% (Shamil & Hendra M, 2015). Pada 3 Maret 2018, Pemerintah Cina kembali secara resmi menyampaikan bahwa anggaran militer untuk tahun 2018 akan meningkat 8,1% setelah sebelumnya tahun 2017 anggaran pertahanan Cina juga meningkat sekitar 7% (CNBC, 2018). Bahkan, berdasarkan data SIPRI yang dihimpun oleh *Trading Economic* (2018) anggaran belanja militer Cina sudah

mencapai angka sekitar 230 miliar dolar untuk tahun 2018. Gambar 2 di bawah ini menunjukkan grafik anggaran militer Cina:

Gambar 2 – Pengeluaran Belanja Militer Cina Tahun 2008-2018



Sumber: Trading Economic dan SIPRI, 2018

Sebagai respon terhadap kondisi tersebut, Jepang juga melakukan peningkatan anggaran militer. Sejak tahun 2005 sampai tahun 2014 anggaran belanja militer Jepang berkisar di angka 30 sampai 40 miliar dolar per tahun. Jepang mengumumkan peningkatan anggaran militernya pada awal tahun 2015 sebesar 42 miliar dolar, peningkatan tersebut merupakan sebuah rekor baru yang lebih besar 2,8% dari anggaran tahun sebelumnya (Jaishankar, 2016). Pada tahun 2018, Kabinet Perdana Menteri Shinzo Abe kembali menyetujui anggaran pertahanan sebesar 45,8 miliar dolar, naik sekitar 1,3% dari tahun sebelumnya. Anggaran tersebut merupakan anggaran terbesar militer Jepang selama ini (Yamaguchi, 2017). Meskipun kenaikannya tidak secara drastis, tetapi Jepang secara konsisten selalu melakukan peningkatan anggaran militer sejak tahun 2014. Gambar 3 di bawah ini memperlihatkan grafik anggaran belanja militer Jepang dalam tahun 2008-2018, sebagai berikut:

Gambar 3 – Pengeluaran Belanja Militer Jepang Tahun 2008-2018



Sumber: Trading Economic dan SIPRI, 2018

Total pengeluaran anggaran militer Cina, Jepang, dan Korea Selatan terus mengalami peningkatan sejak tahun 2005 secara rutin selama tiga belas tahun terakhir sampai tahun 2018. Secara khusus, kenaikan belanja militer Cina sangat diperhatikan oleh negara-negara di kawasan (Hofbauer, Hermann, & Raghavan, 2012). Di sisi lain, yang lebih mengkhawatirkan lagi, *Federation of American Scientists* juga memberikan laporan bahwa semua negara yang memiliki senjata nuklir, saat ini selalu berupaya untuk terus memodernisasi sistem persenjataan nuklir dan misilnya. Amerika Serikat juga termasuk negara yang selalu melakukan modernisasi sistem persenjataan militer. Diperkirakan selama 30 tahun ke depan, program modernisasi senjata nuklir dan sistem persenjataan militer Amerika Serikat akan menelan biaya sekitar 1 triliun dolar (Schlosser, 2015).

Perkembangan teknologi persenjataan dan aliansi militer yang dimiliki oleh Jepang dan Korea Selatan serta modernisasi kapabilitas militer Cina dengan menaikkan anggaran militer secara konsisten setiap tahunnya telah menjadi sumber dilema keamanan di kawasan Asia Timur. Sangat dimungkinkan bagi Cina untuk menggunakan kekuatan militer dalam proses penyelesaian masalah yang berkaitan dengan sengketa wilayah maupun penyelesaian konflik lainnya. Peningkatan kekuatan militer tersebut memicu kekhawatiran di kawasan dan menjadi ancaman bagi negara lain. Pengeluaran anggaran militer dan pertahanan suatu negara merupakan cara paling sederhana untuk mengukur kemampuan militer negara tersebut. Ukuran anggaran pertahanan antarnegara dalam jangka waktu tertentu dapat dibandingkan untuk memperkirakan bagaimana kapabilitas

militer suatu negara. Anggaran pertahanan juga bisa dilihat untuk mengidentifikasi kepentingan keamanan suatu negara (China Power, 2018).

Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa negara-negara kawasan Asia Timur tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh dilema keamanan. Peningkatan anggaran persenjataan suatu negara di kawasan selalu bisa dilihat dan dimaknai sebagai sebuah ancaman keamanan bagi negara lain, begitu pula sebaliknya. Dimana peningkatan kekuatan pertahanan yang dijalankan oleh satu negara ditujukan untuk memperlemah pertahanan negara lainnya, sehingga memicu kekhawatiran dan sikap saling curiga satu sama lain. Kecurigaan tersebut berpotensi menimbulkan konflik dalam skala besar. Kebijakan Cina, Jepang, dan Korea Selatan meningkatkan anggaran belanja militer membuat Korea Utara khawatir, dan kemudian juga berupaya untuk memperkuat kekuatan dan kapabilitas militernya dengan senjata nuklir dan peluru kendali.

Tidak cukup hanya dengan menaikkan anggaran militer, beberapa negara seperti Korea Selatan dan Jepang juga berupaya menangkal ancaman Korea Utara dengan menjalin aliansi keamanan dengan Amerika Serikat. Polaritas kekuatan di Asia Timur juga semakin terlihat dengan pembentukan aliansi militer dan keamanan tersebut. Jalinan kerja sama dan aliansi keamanan antara Korea Selatan dengan Amerika Serikat adalah untuk memperkuat keamanan domestik Korea Selatan. Transfer teknologi persenjataan dan penempatan pasukan Amerika Serikat di Korea Selatan merupakan bentuk implementasi kesepakatan tersebut. Selain itu, Amerika Serikat dengan Jepang juga saling bersepakat dalam perjanjian keamanan dan aliansi bersama. Berdasarkan perjanjian dan kesepakatan tersebut, perlindungan terhadap keamanan domestik Jepang merupakan pilar utama perjanjian. Ancaman-ancaman keamanan yang diterima oleh Jepang secara langsung juga akan menjadi ancaman bagi kepentingan Amerika Serikat, kedua negara saling bersepakat untuk merespon setiap tantangan keamanan di kawasan. Konsekuensinya bagi Jepang dari kesepakatan tersebut adalah Jepang harus mendukung segala kebijakan keamanan Amerika Serikat termasuk kebijakan anti-terorisme dan non-proliferasi nuklir (Tsuneo, 2000).

Bagi Korea Utara, kehadiran Amerika Serikat di kawasan justru semakin menjadi ancaman bagi negara non-aliansi Amerika Serikat termasuk Korea Utara, intervensi Amerika Serikat di kawasan dipandang sebagai upaya untuk mengancam keamanan nasionalnya (Pinkston, 2006). Aliansi dan peningkatan anggaran militer tersebut akhirnya

berimplikasi pada meningkatnya kekuatan satu negara, tetapi melemahkan kekuatan negara di sekitarnya. Berdasarkan konteks tersebut, kerja sama keamanan Amerika Serikat dengan Korea Selatan dan Jepang serta peningkatan anggaran belanja tahunan militer negara-negara di kawasan Asia Timur semakin memperkuat kapabilitas militer masing-masing negara. Runtuhnya Uni Soviet dan terintegrasinya Cina dalam perekonomian global membuat Korea Utara mengalami kesulitan untuk menjalin aliansi dengan negara lain. Ketidakmampuan ekonomi menjadikan Korea Utara tidak memiliki anggaran yang cukup untuk meningkatkan kekuatannya.

Kuantitas dan kualitas sistem persenjataan telah menjadi hal yang menentukan keunggulan bagi Korea Selatan atas sistem persenjataan Korea Utara. Modernisasi yang dilakukan Korea Selatan akibat dari pertumbuhan dan akselerasi ekonomi telah membuat kapabilitas militernya jauh mengungguli Korea Utara. Sebaliknya, instabilitas ekonomi telah memberikan pengaruh signifikan bagi lambatnya modernisasi sistem pertahanan dan militer Korea Utara. Selain itu, kerja sama aliansi keamanan dengan Amerika Serikat telah membuat kapabilitas militer Korea Selatan menjadi semakin kuat (Suh, 2007). Namun dengan pengembangan senjata nuklir dan rudal kini telah menjadikan militer Korea Utara menjadi sedikit lebih unggul (Park, 2001). Perbedaan kekuatan tersebut kemudian menjadikan Korea Utara selalu bersikap waspada sehingga Korea Utara memutuskan untuk tetap berinvestasi pada pengembangan senjata nuklir. Meskipun mengalami permasalahan ekonomi, Korea Utara tidak selalu menerima kebijakan bantuan insentif ekonomi dari negara lain sebagai bentuk kompensasi atas non-proliferasi program nuklirnya. Kebijakan bantuan ekonomi selalu ingin diupayakan negara-negara lain di kawasan, agar Korea Utara meninggalkan program nuklirnya. Kebijakan tersebut selama ini tidak dapat menghasilkan kesepakatan yang maksimal, karena bagi Korea Utara, mempertahankan keamanan nasional lebih penting daripada kesejahteraan ekonomi (Choi, 2013).

Kemampuan nuklir dan peluru kendali diyakini Korea Utara sebagai penjamin yang dapat mempertahankan kepentingannya dan meningkatkan keamanan domestik. Bagi Korea Utara, keunggulan militer negara lain bisa diimbangi dengan kekuatan senjata nuklir. Efektifitas penangkalan nuklir dinilai efektif dalam menanggulangi serangan militer konvensional. Selain itu, sifat destruktif nuklir bisa menjadi strategi *deterrence* yang efektif bagi Korea Utara (Bennett, 2010). Pada tanggal 10 Februari 2005,

Kementerian Luar Negeri Korea Utara secara resmi menyatakan bahwa Korea Utara telah berhasil mengembangkan senjata nuklir sebagai strategi untuk menghadapi Amerika Serikat dan negara-negara aliansinya. Pejabat Korea Utara menyatakan bahwa Korea Utara telah melakukan konversi semua plutonium untuk membuat senjata hulu ledak nuklir. Korea Utara berhasil meluncurkan satelit komunikasi *Kwangmyongsong 2* sebagai bagian dari program pengembangan senjata nuklir dan rudal balistik (Park, 2001).

Kekhawatiran akan stabilitas keamanan di kawasan Asia Timur dikarenakan setiap pengembangan pertahanan satu negara direspons oleh negara tetangga. Rasa khawatir dan sikap saling curiga merupakan salah satu unsur dari dilema keamanan. Korea Utara menginvestasikan banyak anggaran untuk pembangunan nuklir sebagai kompensasi dari menurunnya tingkat kemampuan militer konvensionalnya apabila dibandingkan dengan Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan (Tang, 2009). Saat dihadapkan pada kondisi keamanan yang dilematis akibat gangguan eksternal, strategi pengembangan senjata nuklir dinilai memiliki kemampuan untuk menyeimbangkan kekuatan. Pada akhirnya, dilema keamanan merupakan faktor utama dalam pengembangan senjata nuklir Korea Utara (Hughes, 2007).

Faktor Historis dan Konstruksi Sosial *Amity-Enmity*: Rasionalitas Pengembangan Senjata Nuklir Korea Utara

Dilema keamanan mengacu pada gagasan sederhana, yaitu segala kebijakan yang dilakukan oleh satu negara untuk membuat dirinya lebih aman akan berimplikasi membuat negara lain kurang aman. Misalnya, ketika Kim Jong-un mengembangkan kemampuan rudal nuklir balistik antar benua untuk pertahanan Korea Utara, di sisi lain otomatis akan membuat pertahanan Amerika Serikat, Jepang dan Korea Selatan menjadi tidak aman. Kredibilitas senjata nuklir yang memiliki kemampuan destruktif digunakan Korea Utara untuk mengimbangi kekuatan lawan dan memberikan perlawanan politik. Kebijakan luar negeri Korea Utara yang provokatif selama ini dikarenakan adanya dilema keamanan akibat lingkungan internasional serta kawasan yang tidak menguntungkan. Krisis nuklir pertama adalah hasil dilema keamanan akibat Perang Korea, krisis kedua memberikan kondisi yang jauh lebih rumit ketika masa Perang Dingin.

Lingkungan internasional tersebut mempengaruhi Korea Utara dalam pengembangan senjata nuklir sebagai upaya untuk menangkal potensi konflik. Proses pengembangan senjata nuklir Korea Utara dilakukan dengan menyesuaikan tekanan

internasional sejak masa Perang Korea, Perang Dingin, dan peristiwa 11 September. Kebijakan pengembangan nuklir telah dibentuk oleh pengalaman pahit peristiwa Perang Korea dan Perang Dingin. Pengalaman ini menjadi alasan kuat bagi Korea Utara untuk selalu mewaspadaikan ancaman bagi keamanan nasionalnya (Pinkston, 2006). Pola persahabatan (*amity*) dan permusuhan (*enmity*) yang dimulai sejak masa akhir Perang Korea telah menciptakan warisan sejarah yang membentuk persepsi ancaman antarnegara di kawasan. Pada akhir Perang Dunia Kedua, Semenanjung Korea terpolarisasi secara politik dan geografis. Uni Soviet mendukung Kim Il-sung, sebagai sekretaris pertama Partai Komunis Korea Utara sekaligus menjadi pemimpin Korea Utara. Sementara Korea Selatan, di bawah rezim anti-komunis Rhee Syngman, didukung oleh Amerika Serikat dengan memberikan bantuan ekonomi. Amerika Serikat juga memberikan persenjataan militer modern kepada Korea Selatan. Melihat bantuan Amerika Serikat terhadap Korea Selatan sangat besar, Kim Il-sung kemudian tidak ingin kapasitas militernya jauh tertinggal. Amerika Serikat, kemudian, menjalin hubungan dan kerja sama dengan Uni Soviet. Setelah kunjungan PM Uni Soviet Alexej Kosygin ke Pyongyang pada Februari 1965, Korea Utara dan Uni Soviet saling bersepakat dalam bantuan ekonomi dan militer, termasuk bantuan modernisasi teknologi pertahanan udara (Ahn, 2018).

Kebijakan nuklir dan pengembangan senjata militer merupakan kebijakan yang sangat diprioritaskan Korea Utara sejak masa Kim Il-sung. Faktor historis sangat melekat sebagai alasan dan rasionalitas pengembangan senjata nuklir Korea Utara tersebut. Korea Utara menilai ancaman utama keamanan nasional berasal dari imperialisme Amerika Serikat. Mobilisasi ideologi terus menerus dilakukan melalui pendidikan politik dan propaganda domestik untuk membangkitkan sikap permusuhan terhadap Amerika Serikat (Ahn, 2018). Sejarah masa lalu telah menjadikan Korea Utara selalu mewaspadaikan ancaman dan dominasi Amerika Serikat. Tekanan politik, ekonomi dan sosial yang diterima akibat perbedaan kekuatan militer menjadikan Korea Utara selalu mewaspadaikan ancaman keamanan Amerika Serikat. Kewaspadaan itulah yang menyebabkan Korea Utara untuk mengembangkan senjata nuklir. Pejabat Korea Utara menyatakan bahwa pembangunan program senjata nuklir selama ini dilakukan adalah untuk *deterrence* atas dominasi Amerika Serikat (S.-H. Kim, 2007).

Efektivitas nuklir, baik secara biaya maupun sifat destruktifnya, menjadikan Kim Il-sung memutuskan untuk mengembangkan kemampuan senjata nuklir sebagai upaya

untuk mengimbangi kekuatan militer negara lain, khususnya negara-negara di kawasan Asia Timur. Pembangunan militer secara konvensional akan memerlukan waktu yang lama, serta harus didukung oleh kekuatan ekonomi yang besar. Instabilitas ekonomi Korea Utara menyebabkan pembangunan militer konvensional tidak bisa dilakukan secara efektif dari sisi biaya anggaran militer. Solusi pengembangan senjata nuklir diharapkan bisa memberikan peningkatan kapabilitas militer secara cepat dan efisien. Kemampuan destruktif nuklir yang mampu meluluhlantakkan Hiroshima dan Nagasaki serta menghentikan Perang Dunia Kedua semakin memperkuat asumsi Korea Utara untuk terus mengembangkan senjata nuklir sebagai pilihan utama kebijakan keamanan (Bennett, 2010).

Situasi lingkungan internasional yang berubah sejak akhir tahun 1990-an menjadi kondisi lain yang mengkhawatirkan bagi keamanan Korea Utara. Runtuhnya komunisme dan normalisasi hubungan antara bekas sekutu Korea Utara telah mengancam eksistensi rezim Korea Utara. Pada masa itu, Korea Utara, kemudian, mulai memusatkan perhatian pada pengembangan senjata nuklir agar Korea Utara bisa memiliki keuntungan untuk bertahan dari serangan musuh (Jeong, 2012). Rezim Korea Utara berevolusi secara cepat di bawah kepemimpinan Kim Jong-il. Perannya dalam modifikasi konstitusi pada tahun 1998 sangat meningkatkan kuasa lembaga militer (Ahn, 2018). Kim Jong-il juga menyatakan bahwa militer memiliki posisi penting dalam sistem pemerintahan dan selalu memprioritaskan peran militer dalam politik tingkat nasional dan internasional (Cho, 2009). Kim Jong-il percaya bahwa runtuhnya Uni Soviet dan negara-negara sosialis lainnya di Eropa Timur, disebabkan oleh kekuatan militer yang kurang maksimal. Dengan kata lain, kebijakan dan sistem militer yang kuat perlu didesain untuk mempertahankan keamanan negara (Park, 2001).

Selain Perang Korea dan Perang Dingin, serangan teror 11 September 2001 juga merevolusi pendekatan Amerika Serikat terhadap ancaman nuklir sehingga berdampak pada Korea Utara. Ketakutan bahwa serangan berikutnya mungkin akan dilakukan oleh kelompok teroris dengan didukung oleh senjata nuklir sangat mengkhawatirkan bagi Amerika Serikat. Implikasi dari hal tersebut, Amerika Serikat mengadopsi konsep keamanan nasional yang baru (Asada, 2004). Konsep keamanan ini menyatakan bahwa Amerika Serikat harus selalu siap melakukan tindakan pencegahan yang mengancam keamanan nasional. Media nasional Korea Utara, *Nodong Sinmun*, melaporkan pada 15

Maret 2006 bahwa Korea Utara menjadi target utama Amerika Serikat dalam upaya pencegahan senjata nuklir. Oleh karena itu, uji coba nuklir yang dilaksanakan pada 9 Oktober 2006 merupakan proses yang penting untuk menunjukkan bahwa Korea Utara memiliki kapabilitas nuklir sebagai bagian dari upaya penangkalan ancaman eksternal (Ji, 2009). Lingkungan internasional yang terus berubah, termasuk di dalamnya tekanan politik eksternal, telah menjadikan Korea Utara berada dalam kondisi dilema keamanan dan menghasilkan perilaku provokatif yang ditujukan untuk mempengaruhi persepsi Amerika Serikat terhadap Korea Utara (Y. Kim & Yi, 2005).

Bagian selanjutnya dari rasionalitas pengembangan senjata nuklir bagi Korea Utara adalah pola hubungan *amity* (persahabatan) dan *enmity* (permusuhan). Pola persahabatan dan permusuhan menciptakan konstruksi sosial antarnegara bahwa terdapat kategorisasi 'negara teman' dan 'negara musuh'. Kategorisasi ini sangat mengkhawatirkan karena implikasi dari hal ini adalah munculnya skeptisisme dan kecurigaan dalam hubungan keamanan yang akhirnya menciptakan kondisi dilema antarnegara. Terdapat alasan yang mendasari hubungan *amity* dan *enmity* merupakan aspek yang paling berpengaruh dalam pembentukan dilema keamanan. Pola *amity* dan *enmity* akan berujung kepada formulasi kedekatan negara. Pola persahabatan dan permusuhan ini memicu keterlibatan pihak eksternal yang menentukan persepsi negara teman dan negara musuh. Keterlibatan pihak eksternal bisa berwujud dalam bentuk aliansi keamanan.

Aspek *amity* antara Korea Selatan dan Amerika Serikat mulai tumbuh dan berkembang sejak masa Perang Korea. Hubungan yang sangat akrab ditunjukkan oleh dukungan Amerika Serikat kepada Korea Selatan dalam menghadapi Korea Utara. Karakter dan pola hubungan *amity* and *enmity* antara negara-negara di kawasan termasuk juga didalamnya hubungan antara Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan dan Korea Utara cukup kompleks. Masing-masing negara mempunyai aspek *amity* dan *enmity* satu sama lain. Pola *amity* dan *enmity* antar negara relatif bersifat persisten, artinya tetap tidak berubah dan cenderung stabil karena banyak terpengaruh oleh perubahan lingkungan politik eksternal masing-masing negara. Secara umum, aspek *enmity* jauh lebih dominan dari pada aspek *amity*. Aliansi pertahanan Amerika Serikat dengan Jepang dan Korea Selatan di kawasan Asia Timur telah menciptakan kondisi ini. Keterlibatan pihak eksternal, sejak masa Perang Dingin di Asia Timur telah menciptakan kompleksitas keamanan kawasan. Pihak eksternal cenderung memiliki kepentingan yang berbeda

dengan negara-negara di kawasan sehingga konsesi bersama sulit didapatkan. Kondisi dilema keamanan mulai terlihat ketika keterlibatan pihak eksternal tersebut dipahami sebagai sebuah ancaman terhadap hubungan keamanan antarnegara (Yang & Mas'ood, 2004).

Konstruksi sosial *amity* dan *enmity* menyebabkan terjadinya pola permusuhan yang tercipta antarnegara. Pola permusuhan ini terlihat ketika Amerika Serikat dengan Jepang dan Korea Selatan berupaya untuk membendung pengaruh komunisme di Korea Utara. Kini, aliansi tersebut bertujuan untuk menghentikan program pengembangan senjata nuklir Korea Utara. Ketika Perang Dingin berakhir, aliansi Amerika Serikat dan Korea Selatan semakin terjalin dengan solid untuk upaya tersebut (Park, 2001). Persetujuan aliansi strategis antara Korea Selatan dan Jepang dengan Amerika Serikat adalah penegasan kembali komitmen Amerika Serikat untuk memberikan perlindungan dan memperkuat militer Korea Selatan dan Jepang yang secara otomatis mengkhawatirkan bagi keamanan Korea Utara (Chung, 2016).

Berakhirnya Perang Dingin, idealnya, memungkinkan Amerika Serikat dan Korea Utara untuk menjalin hubungan yang lebih harmonis daripada sebelumnya, dengan anggapan Uni Soviet sudah tidak lagi bisa menjalin hubungan dengan Korea Utara. Namun hingga kini ternyata relasi antara kedua negara tetap tidak terjalin dengan baik. Korea Utara menyakini bahwa aliansi Amerika Serikat dengan Korea Selatan dan Jepang justru membahayakan bagi keamanan nasionalnya. Aliansi ini telah memberikan pengaruh yang signifikan dalam hubungan Amerika Serikat, Korea Selatan, Jepang, dan Korea Utara (S.-H. Kim, 2007). Oleh karena itu, sangat rasional bagi Korea Utara untuk membangun negara dengan kekuatan militer yang kuat.

Upaya mempertahankan keamanan dan kedaulatan menjadi prioritas utama bagi Korea Utara. Ideologi kemandirian *Juche* yang dicetuskan oleh pemimpin Korea Utara telah menjadi pedoman ideologi kebijakan keamanan dan politik luar negeri. Rekonseptualisasi *Juche* secara sederhana dipahami sebagai bentuk integrasi (mobilisasi atau penyatuan) termasuk didalamnya mobilisasi massa internal dalam upaya mendukung kebijakan nuklir serta perlawanan (resistensi) secara eksternal terhadap ancaman keamanan. Pemimpin Korea Utara percaya bahwa ideologi *Juche* berhasil melindungi negara dari ancaman eksternal yang membubarkan negara-negara sosialis lainnya (Park, 2001).

Perlawanan tersebut diupayakan dengan kemandirian sistem persenjataan sebagai bentuk *survival* negara. Bentuk nyata dari tindakan ini adalah pengembangan senjata nuklir. Korea Utara percaya bahwa Amerika Serikat memiliki pengaruh yang sangat besar dalam menghilangkan komunisme di negara-negara pecahan Uni Soviet dan Eropa Timur. Kekhawatiran tersebut sampai kini masih dirasakan oleh Korea Utara. Paradigma ini tidak mengubah situasi masa lalu. Penindasan dan imprealisme Amerika Serikat ketika Perang Korea menyebabkan trauma berkepanjangan bagi rakyat Korea Utara. Menurut Seong Cho (2009), tidak mudah bagi Korea Utara untuk melepaskan program nuklirnya dikarenakan senjata nuklir adalah satu-satunya alat untuk melawan dominasi dan mencegah superioritas militer Amerika Serikat.

Persepsi ini semakin diperkuat dengan adanya sanksi ekonomi yang diberikan sebagai alat untuk menekan program nuklir Korea Utara. Selama ini sanksi tersebut selalu diupayakan oleh Amerika Serikat dalam bentuk pembatasan ekspor perdagangan, pembekuan aset kekayaan, serta kebijakan isolasi ekonomi dan perdagangan yang akhirnya semakin membuat Korea Utara kesulitan dalam kegiatan ekonomi internasional. Hal ini tentu juga menyebabkan Korea Utara kesulitan untuk melakukan hubungan diplomatik. Runtuhnya Uni Soviet dan pengintegrasian Cina dalam perekonomian global termasuk juga dengan Amerika Serikat tidak lagi bisa menjamin komitmen bersama untuk saling membantu dalam bidang keamanan dan ekonomi seperti yang sudah disepakati dalam pakta pertahanan *Sino-Korean Treaty on Friendship, Cooperation, and Mutual Assistance* (Ji, 2009).

Kondisi tersebut menyebabkan Korea Utara tetap untuk mempertahankan kebijakan nuklir di tengah tekanan internasional. Bagi Korea Utara, nuklir merupakan jaminan utama untuk mempertahankan keamanan dan kepentingan, baik secara politik maupun keamanan. Aliansi keamanan dengan adanya penempatan pasukan gabungan Amerika Serikat–Korea Selatan di sekitar zona demiliterisasi serta sanksi ekonomi membuat Korea Utara selalu merasa tertekan dan terancam oleh kebijakan Amerika Serikat di kawasan. Tekanan ini, pada akhirnya, menyebabkan relasi antar kedua negara tidak terjalin dengan baik. Peningkatan anggaran militer negara-negara di kawasan Asia Timur semakin menambah kompleks situasi keamanan. Bagi Korea Utara, kondisi tersebut akan memberikan potensi ancaman. Sangat logis, jika opsi pengembangan senjata nuklir dilakukan. Pada sisi lain, dengan senjata nuklir Korea Utara juga bisa berharap

memberikan *deterrence* bagi negara-negara lain akibat dari kawasan yang sangat rentan dengan konflik.

Di sisi lain, pengembangan nuklir Korea Utara akan memicu aksi-reaksi dalam pengembangan senjata militer negara lain. Aksi Korea Utara untuk mengembangkan program nuklirnya bisa memicu perlombaan senjata (*arms race*) di kawasan. Senjata nuklir Korea Utara bisa menjadi alasan atas aksi Korea Selatan dan Jepang untuk ikut serta mengembangkan senjata nuklir dan kapabilitas militer. Sebagai bukti, Korea Selatan kini terus berupaya membujuk Amerika Serikat dalam kerja sama perluasan senjata nuklir. Selama ini, terjalin kesepakatan Amerika Serikat melarang Korea Selatan untuk mengembangkan senjata nuklir. Korea Selatan mengkhawatirkan pesatnya kemajuan program nuklir Korea Utara membuat sistem persenjataan dan teknologi Amerika Serikat tidak cukup kuat untuk mencegah dampak perang di Semenanjung Korea (Choi, 2013). Tidak hanya bagi Korea Selatan, Jepang juga terus berupaya untuk memperluas kerja sama keamanan dan aliansi militer. Kini, tidak hanya menjalin aliansi dengan Amerika Serikat, dilema keamanan serta kompleksitas kawasan khususnya interaksi dengan Cina dan Korea Utara membuat Jepang menjalin aliansi keamanan yang lebih kuat dengan India. Kedua negara saling bersepakat untuk mengembangkan kemitraan pertahanan yang lebih erat melalui latihan reguler gabungan di bidang maritim serta koordinasi politik dan keamanan domestik. Kolaborasi keamanan yang terus berkembang antara negara-negara demokrasi terbesar dan negara dengan kekuatan ekonomi tinggi di Asia ini akan memainkan peran penting dalam keseimbangan kekuasaan regional (Jaishankar, 2016).

Kemajuan kapabilitas nuklir Korea Utara akan mengancam kepentingan Amerika Serikat, khususnya dalam hubungannya dengan Jepang. Kemajuan tersebut juga berimplikasi pada meningkatnya potensi ancaman bagi negara yang selama ini bertikai dengan Korea Utara termasuk juga Korea Selatan. Negara yang memiliki senjata nuklir tidak akan berani menyerang satu sama lain karena takut pemusnahan massal terjadi bagi kedua belah pihak. Akan terjadi masalah keamanan yang sangat besar jika terdapat negara yang mengembangkan senjata nuklir. Hal ini, akhirnya, akan menciptakan dinamika perlombaan senjata yang sangat mengkhawatirkan bagi stabilitas keamanan kawasan (Jeong, 2012).

Pada akhirnya, kebijakan nuklir Korea Utara menimbulkan aksi-reaksi dan memicu pembangunan militer sebagai upaya perimbangan kekuatan (*balance of power*) di

kawasan Asia Timur. Upaya suatu negara untuk meningkatkan militernya secara tidak langsung akan melemahkan kekuatan militer negara lain dan memicu negara-negara lain untuk ikut serta mengembangkan kekuatan militer. Aksi-reaksi yang terjadi di kawasan Asia Timur akibat aliansi keamanan dan peningkatan anggaran militer secara langsung tidak hanya meningkatkan potensi ancaman bagi Korea Utara, tetapi juga negara-negara lain di kawasan. Peningkatan kapabilitas militer sangat logis apabila dilakukan dengan melihat kondisi ini. Aksi-reaksi pengembangan senjata berjalan secara simultan di kawasan akibat dilema keamanan yang dirasakan masing-masing negara. Peningkatan kapabilitas nuklir Korea Utara menjadi ancaman bagi keamanan masing-masing negara. Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan menilai bahwa Korea Utara menjadi ancaman yang paling mengkhawatirkan bagi keamanan kawasan. Di sisi lain, Korea Utara menyatakan bahwa peningkatan anggaran militer dan jalinan aliansi trilateral Amerika Serikat yang menjadi permasalahan utama dilema keamanan di kawasan. Peluang terjadinya perang nuklir masih menjadi kendala utama dalam upaya stabilisasi keamanan kawasan (Saunders, 2012).

Simpulan

Dilema keamanan di kawasan Asia Timur bersumber pada adanya rasa takut dan persepsi ancaman akibat peningkatan kekuatan dan kapabilitas militer Negara-negara yang ada di kawasan Asia Timur maupun kondisi eksternal berupa *setting* lingkungan internasional. Korea Utara, Korea Selatan, Jepang melakukan peningkatan kekuatan militer yang didukung pula oleh pola hubungan persahabatan (*amity*) dan permusuhan (*enmity*) antar Amerika Serikat dan Cina, serta bayang-bayang pengaruh Perang Dingin dari Uni Soviet. Rasionalitas pengembangan senjata nuklir dilakukan oleh Korea Utara ketika logika dilema keamanan terjadi. Keadaan dilematis tersebut bagi Korea Utara ditandai dengan polaritas kekuatan, faktor historis dan konstuksi sosial *amity* dan *enmity*. Polaritas kekuatan adalah perbedaan kekuatan militer yang terjadi akibat jalinan aliansi keamanan Amerika Serikat yang akhirnya memperkuat kapabilitas militer Korea Selatan dan Jepang.

Aktor-aktor tersebut berupaya keras dengan mengandalkan kerja sama untuk menyinergikan pelbagai sumber daya dan kekuatan untuk meraih kepentingan dan mempertahankan kekuasaan. Namun ironisnya, strategi yang diterapkan negara-negara di kawasan Asia Timur, justru menghidupkan kondisi dilema keamanan di kawasan yang

menghambat keberlangsungan proses perdamaian di kawasan. Selain itu, polaritas kekuatan terlihat pula dari peningkatan anggaran militer dan persenjataan yang terus meningkat setiap tahunnya. Faktor historis serta konstuksi sosial *amity* dan *enmity* menjadi faktor lain dalam pembentuk logika dilema keamanan bagi Korea Utara. Kondisi masa lalu ketika Perang Korea, Perang Dingin dan pasca serangan 11 September telah mengakibatkan Korea Utara selalu merasa semakin terancam oleh agresi dan invasi negara lain, khususnya Amerika Serikat. Kekhawatiran itu semakin bertambah karena rasa curiga di antara negara-negara kawasan akibat adanya pola permusuhan (*enmity*) antarnegara kawasan dan minimnya kerangka kerja sama kawasan yang mendorong negara-negara untuk meningkatkan kekuatan militernya akibat rasa curiga dan hal ini secara langsung telah memperlemah pertahanan militer negara lain.

Rasionalitas Korea Utara muncul ketika Korea Utara menganggap ancaman keamanan dari Amerika Serikat, Jepang dan Korea Selatan membahayakan keamanan domestik sehingga Korea Utara berusaha melakukan pengembangan senjata nuklir untuk meningkatkan teknologi pertahanan serta mengimbangi keunggulan militer negara-negara lain di Asia Timur. Saat dihadapkan pada kondisi keamanan yang dilematis akibat gangguan eksternal, rasionalitas strategi pengembangan senjata nuklir memiliki kemampuan efektif untuk menyeimbangkan kekuatan dan menangkal ancaman eksternal.

Di satu sisi, pengembangan senjata nuklir mengakibatkan reaksi berantai yang meningkatkan tensi keamanan di Asia Timur. Perlombaan senjata, pada akhirnya, merupakan realitas yang tidak dapat dihindarkan. Pembangunan senjata militer, baik senjata nuklir maupun senjata konvensional, akan saling mempengaruhi kebijakan negara-negara di kawasan. Di sisi lain, jaminan keamanan Amerika Serikat terhadap Jepang dan Korea Selatan juga tidak memberikan kepastian akan mampu menangkal serangan Korea Utara. Dengan demikian, sangat masuk akal bagi Jepang dan Korea Selatan untuk meningkatkan pertahanan atau kapabilitas militer. Tindakan Jepang dan Korea Selatan, kemudian, dianggap sebagai ancaman kembali bagi Korea Utara. Pada akhirnya, siklus dilema keamanan akan terus terjadi dan tidak berhenti di kawasan Asia Timur. Dilema keamanan tersebut akan menciptakan dinamika perlombaan senjata yang sangat mengkhawatirkan bagi stabilitas keamanan Asia Timur.

Daftar Pustaka

Ahn, K. S. (2018). North Korea Mission in Historical Perspective. *International Bulletin*

- of Mission Research*, 42(2), 116–124. <https://doi.org/10.1177/2396939318756506>
- Asada, M. (2004). Arms Control Law in Crisis? A Study of the North Korean Nuclear Issue. *Journal of Conflict and Security Law*, 9(3), 331–355. <https://doi.org/10.1093/jcsl/9.3.331>
- Bennett, B. W. (2010). Uncertainties in the North Korean Nuclear Threat. Diambil dari https://www.rand.org/pubs/DOCUMENTED_briefings/DB589.html
- Booth, K., & Wheeler, N. J. (2008). *The Security Dilemma : Fear, Cooperation and Trust in World Politics*. Palgrave Macmillan.
- Buzan, B., & Wæver, O. (2003). *Regions and Powers: the Structure of International Security*. Cambridge University Press.
- China Power. (2018). What does China Really Spend on Its Military? | ChinaPower Project. Diambil 24 Mei 2018, dari <https://chinapower.csis.org/military-spending/>
- Cho, S.-R. (2009). North Korea's Security Dilemma and Strategic Options. *The Journal of East Asian Affairs*. Institute for National Security Strategy. <https://doi.org/10.2307/23258186>
- Choi, J. (2013). A Game Changer: North Korea's Third Nuclear Test and Northeast Asian Security. *The Journal of East Asian Affairs*, 27(1), 99. Diambil dari <https://www.questia.com/library/journal/1P3-3102339901/a-game-changer-north-korea-s-third-nuclear-test-and>
- Chung, S. (2016). North Korea's Nuclear Threats and Counter-Strategies. *The Journal of East Asian Affairs*. Institute for National Security Strategy. <https://doi.org/10.2307/44160975>
- CNBC. (2018). China raises 2018 military budget by 8.1 percent. Diambil 24 Mei 2018, dari <https://www.cnn.com/2018/03/04/china-raises-2018-military-budget-by-8-point-1-percent.html>
- East West Center. (2016). Seminar: The Asymmetrical Structure of the U.S.-North Korean Security Dilemma | East-West Center | www.eastwestcenter.org. Diambil 24 Mei 2018, dari <https://www.eastwestcenter.org/Events/Seminar-The-Asymmetrical-Structure-The-Us-North-Korean-Security-Dilemma>
- Fearon, J. D. (2017). The Big Problem with The North Koreans isn't that We Can't Trust Them. It's that They Can't Trust Us. - The Washington Post. Diambil 24 Mei 2018, dari https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2017/08/16/the-big-problem-with-north-korea-isnt-that-we-cant-trust-them-its-that-they-cant-trust-us/?noredirect=on&utm_term=.a39f1f445c4d
- Feffer, J. (2009). Introduction to the Special Issue: An Arms Race In Northeast Asia? *Asian Perspective*. Lynne Rienner Publishers. <https://doi.org/10.2307/42704690>
- Grevatt, J. (2017). South Korea Boosts Defence Spending | Jane's 360. Diambil 24 Mei 2018, dari <http://www.janes.com/article/73404/south-korea-boosts-defence-spending>
- Grice, F. (2017). The Improbability of Popular Rebellion in Kim Jong-un's North Korea and Policy Alternatives for the USA. *Journal of Asian Security and International*

- Affairs*, 4(3), 263–293. <https://doi.org/10.1177/2347797017732227>
- Hofbauer, J., Hermann, P., & Raghavan, S. (2012). *Asian Defense Spending*. CSIS
- Hughes, C. W. (2007). North Korea's Nuclear Weapons: Implications for the Nuclear Ambitions of Japan, South Korea, and Taiwan. *Asia Policy*, 3(1), 75–104. <https://doi.org/10.1353/asp.2007.0000>
- Jaishankar, D. (2016). India and Japan: Emerging Indo-Pacific Security Partnership. Diambil 24 Mei 2018, dari <https://www.brookings.edu/opinions/india-and-japan-emerging-indo-pacific-security-partnership/>
- Jeong, I.-Y. (2012). Solving the Security Dilemma between North Korea and Japan. *The Journal of East Asian Affairs*. Institute for National Security Strategy. <https://doi.org/10.2307/23595521>
- Ji, Y. (2009). Three Paradigms of North Korea's Nuclear Ambitions. *Journal of Political Inquiry*, 4(1), 1–12. Diambil dari <http://jpi-nyu.org/wp-content/uploads/2011/02/JPI-2-JI.pdf>
- Johnson, J., & Kikuchi, D. (2018). With Historic Meeting of Leaders, North Korea and China Shore Up Leverage as Kim-Trump Talks Loom | The Japan Times. Diambil 24 Mei 2018, dari <https://www.japantimes.co.jp/news/2018/03/28/asia-pacific/historic-meeting-leaders-north-korea-china-shore-leverage-kim-trump-talks-loom/#.WwYdeTjLJqx>
- Kim, S.-H. (2007). North Korea: Between Survival and Glory. *Journal of Korean Studies*, 12(1), 186–198. <https://doi.org/10.1353/jks.2007.0010>
- Kim, Y., & Yi, Y. (2005). Security Dilemmas and Signaling during the North Korean Nuclear Standoff. *Asian Perspective*. Lynne Rienner Publishers. <https://doi.org/10.2307/42704515>
- McKirby, E., & Novak, K. (2015). North, South Korea Hold Talks Amid Tensions - CNN. Diambil 24 Mei 2018, dari <https://edition.cnn.com/2015/08/23/asia/koreas-tensions/index.html>
- Morgan, P. M. (2006). Deterrence and System Management: The Case of North Korea. *Conflict Management and Peace Science*, 23(2), 121–138. <https://doi.org/10.1080/07388940600665768>
- Muhaimin. (2018). Timeline Kim Jong-un dan Trump Seteru Nuklir hingga... Diambil 24 Mei 2018, dari <https://international.sindonews.com/read/1288466/40/timeline-kim-jong-un-dan-trump-seteru-nuklir-hingga-akur-1520636441>
- Panda, A. (2015). South Korea Is Planning a Huge Increase in Defense Spending | The Diplomat. Diambil 24 Mei 2018, dari <https://thediplomat.com/2015/04/south-korea-is-planning-a-huge-increase-in-defense-spending/>
- Park, K.-A. (2001). North Korea's Defensive Power and U.S.-North Korea Relations. In *Korean Security Dynamics in Transition* (pp. 83–104). New York: Palgrave Macmillan US. https://doi.org/10.1057/9780230107465_5
- Pinkston, D. A. (2006). North Korea's Foreign Policy Towards the United States. *Strategic Insights*, 5(7), 20–30.

- Saunders, P. (2012). Extended Deterrence and Security in East Asia: A US-Japan-South Korea Dialogue — The Tokyo Foundation for Policy Research. Diambil 24 Mei 2018, dari <http://www.tokyofoundation.org/en/articles/2013/extended-deterrence-and-security-in-east-asia>
- Schlosser, E. (2015). Today's nuclear dilemma. *Bulletin of the Atomic Scientists*, 71(6), 11–17. <https://doi.org/10.1177/0096340215611107>
- Shamil, M., & Hendra M, A. (2015). Jepang-China Berlomba Perkuat Militer | Halaman 2. Diambil 24 Mei 2018, dari <https://nasional.sindonews.com/read/973848/149/jepang-china-berlomba-perkuat-militer-1425868836/13>
- Singh, M. (2018). 3 Steps Trump Should Take Before Meeting Kim Jong Un – Foreign Policy. Diambil 24 Mei 2018, dari <http://foreignpolicy.com/2018/03/23/three-steps-trump-should-take-before-meeting-kim-north-korea-united-states/>
- Suh, J.-J. (2007). Power and Alliance: Assessing Military Balance in Korea. In *Power, Interest, and Identity in Military Alliances* (pp. 29–62). New York: Palgrave Macmillan US. https://doi.org/10.1057/9780230605015_2
- Tang, S. (2009). The Security Dilemma: A Conceptual Analysis. *Security Studies*, 18(3), 587–623. <https://doi.org/10.1080/09636410903133050>
- The Guardian. (2015). North Korea prepared to risk “all-out war” as Kim Jong-un puts troops on alert | World news | The Guardian. Diambil 24 Mei 2018, dari <https://www.theguardian.com/world/2015/aug/22/north-korea-prepared-to-risk-all-out-war-as-kim-jong-un-puts-troops-on-alert>
- Trading Economics. (2018). South Korea Military Expenditure | 1953-2018 | Data | Chart | Calendar. Diambil 24 Mei 2018, dari <https://tradingeconomics.com/south-korea/military-expenditure>
- Tsuneo, A. (2000). U.S.-Japan Relations in the Post-Cold War Era: Ambiguous Adjustment to a Changing Strategic Environment. In *Japanese Foreign Policy Today* (pp. 177–193). New York: Palgrave Macmillan US. https://doi.org/10.1007/978-1-349-62529-1_10
- Yamaguchi, M. (2017). Japan Cabinet approves record \$46B defense budget. Diambil 24 Mei 2018, dari <https://www.defensenews.com/global/asia-pacific/2017/12/27/japan-cabinet-approves-record-46b-defense-budget/>
- Yang Seung-Yoon, & Mas'ood, M. (2004). *Politik luar negeri Korea Selatan: penyesuaian diri terhadap masyarakat internasional*. Gadjah Mada University Press. Diambil dari <http://ugmpress.ugm.ac.id/id/product/sosial-politik/politik-luar-negeri-korea-selatan-penyediaan-diri-terhadap-masyarakat-internasional>
- Yea, S. (2017). Demystifying the Survival of North Korea. *Journal of Asian Security and International Affairs*, 4(1), 50–68. <https://doi.org/10.1177/2347797016689208>